

Analisis Efektivitas Kebijakan Pencanangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Analysis Of The Effectiveness Of The Special Economic Zone (SEZ) Designation Policy On Regional Economic Growth

Antje Tuasela¹, Habel Taime²

Institut Jambatan Bulan^{a,b}

antjetuasela@gmail.com^a, habeltaime401@gmail.com^b

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the policy for establishing Special Economic Zones (SEZs) in promoting regional economic growth and to identify factors influencing the success of their implementation. This study employs a literature review method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from scholarly journal articles, academic books, policy documents, legislation, and official publications related to SEZs and regional economic development. The analysis was conducted through the identification, selection, classification, comparison, and synthesis of previous research findings, focusing on investment, Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth, employment, income, poverty, inequality, and spillover effects. The findings indicate that SEZ policies have significant potential to promote regional economic growth through increased investment, production activities, employment creation, and the development of leading economic sectors. However, the effectiveness of SEZs is heterogeneous and context-dependent, as it is influenced by infrastructure quality, human capital, institutional capacity, industrial linkages with the local economy, and the ability to generate multiplier effects for surrounding areas. Therefore, SEZ success should not be measured solely by investment realization and the number of operating firms but also by its contribution to economic growth, community welfare, productivity, and the equitable distribution of development benefits. The study recommends strengthening the integration of SEZs with regional development strategies, improving local workforce competencies, developing local small and medium-sized enterprises, and implementing continuous policy evaluation.

Keywords: *Special Economic Zones, policy effectiveness, regional economic growth, investment, regional development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang relevan dengan KEK dan pembangunan ekonomi daerah. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, pengelompokan, perbandingan, dan sintesis temuan penelitian terdahulu dengan memperhatikan aspek investasi, pertumbuhan PDRB, kesempatan kerja, pendapatan, kemiskinan, ketimpangan, dan *spillover effect*. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan KEK memiliki potensi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor ekonomi unggulan. Namun, efektivitas KEK bersifat heterogen dan kontekstual karena dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, keterkaitan industri dengan ekonomi lokal, serta kemampuan menciptakan efek pengganda bagi wilayah sekitar. Dengan demikian, keberhasilan KEK tidak cukup diukur berdasarkan realisasi investasi dan jumlah perusahaan, tetapi perlu dilihat dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, produktivitas, dan pemerataan manfaat pembangunan. Penelitian merekomendasikan penguatan integrasi KEK dengan strategi pembangunan daerah, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, efektivitas kebijakan, pertumbuhan ekonomi daerah, investasi, pembangunan regional.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional karena pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan output secara agregat, tetapi juga menyangkut kemampuan setiap wilayah dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menarik investasi, mengembangkan aktivitas produktif, serta mengurangi kesenjangan antardaerah. Dalam konteks negara dengan karakteristik geografis dan tingkat perkembangan wilayah yang beragam seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi cenderung menunjukkan perbedaan antarwilayah. Beberapa daerah memiliki basis industri, infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses pasar yang relatif kuat, sedangkan daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan konektivitas, investasi, produktivitas, dan kapasitas fiskal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan pembangunan berbasis wilayah (*place-based policy*) yang secara khusus diarahkan pada kawasan tertentu yang dianggap memiliki potensi ekonomi strategis.

Salah satu instrumen kebijakan berbasis wilayah yang dikembangkan pemerintah Indonesia adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kebijakan KEK pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pemberian fasilitas dan kemudahan tertentu kepada kegiatan usaha yang berada di dalam kawasan. KEK diharapkan dapat meningkatkan investasi, mempercepat industrialisasi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara konseptual, pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi dalam wilayah tertentu dapat menghasilkan agglomeration economies, yaitu keuntungan ekonomi yang muncul karena kedekatan antarpelaku usaha, tenaga kerja, pemasok, infrastruktur, teknologi, dan pasar. Dengan demikian, keberadaan KEK tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan di dalam kawasan, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian wilayah di sekitarnya.

Secara kelembagaan, kebijakan KEK memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menjadi salah satu dasar utama penyelenggaraan KEK di Indonesia. Selanjutnya, penyelenggaraan KEK diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan KEK, mulai dari lokasi, kriteria dan kegiatan usaha, pengusulan serta penetapan KEK, pembangunan dan pengoperasian kawasan, kelembagaan, pengelolaan, hingga pemberian fasilitas dan kemudahan. Fasilitas tersebut antara lain mencakup aspek perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha.

Pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan KEK sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat transformasi ekonomi daerah. Logika kebijakannya adalah bahwa insentif dan kemudahan usaha dapat menurunkan biaya transaksi dan biaya investasi, memperbaiki kepastian berusaha, serta mendorong perusahaan untuk menanamkan modal pada kawasan yang telah ditetapkan. Masuknya investasi selanjutnya diharapkan meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan

pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas basis pajak dan aktivitas ekonomi, serta membentuk keterkaitan ekonomi antara perusahaan di dalam KEK dengan pelaku usaha lokal di luar kawasan. Dengan demikian, keberhasilan KEK seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah investasi yang masuk ke kawasan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana investasi tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah.

Perkembangan KEK di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi dan usaha. Data Dewan Nasional KEK menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 terdapat 24 KEK di Indonesia, dengan akumulasi investasi mencapai sekitar Rp263,4 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang, dan keterlibatan 403 pelaku usaha. Khusus pada tahun 2024, realisasi investasi KEK mencapai sekitar Rp90,1 triliun atau 115 persen dari target, sedangkan penyerapan tenaga kerja mencapai 47.747 orang atau 122 persen dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK telah menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk menarik investasi dan memperluas aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, besarnya investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap belum secara otomatis membuktikan bahwa kebijakan KEK telah efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Efektivitas kebijakan publik perlu dilihat berdasarkan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Dalam konteks KEK, pertanyaan penting bukan hanya apakah investasi meningkat setelah suatu wilayah ditetapkan sebagai KEK, tetapi juga apakah penetapan tersebut menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, kesempatan kerja, produktivitas, pendapatan masyarakat, perkembangan sektor ekonomi lokal, serta pengurangan kesenjangan antardaerah. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan untuk membedakan antara output kebijakan dan outcome kebijakan. Jumlah investasi, jumlah perusahaan, dan jumlah tenaga kerja merupakan indikator penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan dampak ekonomi jangka menengah dan jangka panjang dari KEK.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting karena kebijakan berbasis wilayah seperti KEK memiliki risiko menghasilkan manfaat yang terkonsentrasi hanya di dalam kawasan. Jika aktivitas ekonomi yang berkembang di dalam KEK tidak memiliki keterkaitan yang kuat dengan perekonomian lokal, maka pertumbuhan kawasan dapat berlangsung tanpa menghasilkan spillover effect yang signifikan terhadap wilayah sekitar. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di KEK dapat menggunakan bahan baku dari luar daerah, mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah, menggunakan jasa perusahaan eksternal, dan mengirimkan keuntungan ke luar daerah. Dalam kondisi demikian, peningkatan aktivitas ekonomi di dalam kawasan belum tentu diikuti peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat lokal secara proporsional. Dengan kata lain, keberhasilan suatu KEK harus dilihat tidak hanya dari performa internal kawasan, tetapi juga dari kemampuan kawasan menciptakan keterkaitan ekonomi (economic linkages) dengan wilayah sekitarnya.

Literatur mengenai kebijakan berbasis wilayah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan seperti KEK sangat bergantung pada kondisi awal suatu wilayah, kualitas infrastruktur, aksesibilitas, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta karakteristik insentif yang diberikan. Duranton dan Venables (2018) menegaskan bahwa kebijakan berbasis tempat memang dirancang untuk mendorong

investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi pada wilayah sasaran, tetapi evaluasi dampaknya tidak sederhana karena harus mempertimbangkan efek langsung, efek tidak langsung, serta kemungkinan terjadinya perpindahan aktivitas ekonomi dari satu wilayah ke wilayah lain.

Pengalaman Indonesia dalam kebijakan pembangunan kawasan juga menunjukkan bahwa pemberian insentif semata tidak selalu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Penelitian Rothenberg, Wang, dan Chari (2025) mengenai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di Indonesia menemukan bahwa insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan di wilayah KAPET tidak secara signifikan meningkatkan masuknya perusahaan maupun output. Temuan tersebut menunjukkan bahwa insentif fiskal akan lebih efektif apabila disertai dengan perbaikan lain yang bersifat place-based, seperti infrastruktur, pelayanan publik, konektivitas, dan kondisi pendukung investasi.

Temuan tersebut relevan untuk mengevaluasi kebijakan KEK karena KEK juga menggunakan kombinasi antara insentif, kemudahan berusaha, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan kawasan sebagai instrumen untuk menarik investasi. OECD (2020) mencatat bahwa pengalaman kebijakan kawasan di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak seragam. Kebijakan berbasis kawasan cenderung lebih berhasil pada wilayah yang memiliki keunggulan geografis, infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, dan akses pasar, sedangkan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menghadapi tantangan lebih besar dalam menarik investasi dan menghasilkan productivity spillovers. Oleh karena itu, desain kebijakan KEK perlu memperhatikan karakteristik spesifik masing-masing daerah dan tidak dapat hanya mengandalkan pemberian insentif.

Dalam konteks Indonesia, bukti empiris mengenai dampak KEK terhadap pembangunan daerah mulai menunjukkan hasil yang cukup beragam. Penelitian Fadillah (2023), misalnya, menggunakan pendekatan difference-in-differences untuk menganalisis dampak KEK terhadap pembangunan ekonomi lokal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendirian KEK berkaitan dengan peningkatan PDB per kapita, lapangan kerja, dan upah tenaga kerja serta penurunan ketimpangan pendapatan pada kota yang menjadi lokasi KEK dibandingkan dengan kelompok kontrol. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa KEK dapat menghasilkan dampak positif terhadap sejumlah indikator pembangunan ekonomi lokal.

Namun, bukti mengenai dampak KEK tidak sepenuhnya konsisten. Taufiqurrahman dan Khoirunurrofik (2023), melalui penelitian menggunakan metode synthetic control, menemukan bahwa dampak KEK terhadap kemiskinan berbeda antarwilayah. Dari delapan kabupaten/kota yang dianalisis, empat wilayah mengalami penurunan kemiskinan, sedangkan empat wilayah lainnya justru mengalami peningkatan kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KEK tidak menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang seragam pada semua daerah. Variasi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas KEK dipengaruhi oleh konteks lokal, karakteristik kawasan, struktur ekonomi, keterhubungan dengan masyarakat lokal, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan keberadaan kawasan.

Penelitian Violita dan Khoirunurrofik (2025) juga memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan dimensi spasial dalam mengevaluasi KEK. Penelitian tersebut menganalisis peran KEK terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus kemungkinan adanya spillover effect terhadap kabupaten/kota di sekitar kawasan.

Pendekatan tersebut penting karena dampak pembangunan kawasan tidak selalu berhenti pada batas administratif KEK. Infrastruktur, tenaga kerja, rantai pasok, konsumsi rumah tangga, jasa transportasi, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya dapat menghubungkan kawasan dengan daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas KEK perlu memperhatikan apakah pertumbuhan yang muncul bersifat terlokalisasi atau justru menyebar ke wilayah sekitar.

Kajian mengenai KEK pariwisata juga memberikan gambaran mengenai pentingnya evaluasi berbasis indikator pertumbuhan daerah. Oktaviana dan Qibthiyyah (2025) menganalisis dampak KEK pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur melalui PDRB menggunakan pendekatan Difference-in-Difference dengan staggered treatment timing untuk periode 2010–2022. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa KEK pariwisata perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, bukan semata-mata berdasarkan pembangunan fisik atau jumlah investasi di dalam kawasan.

Contoh lain dapat dilihat pada KEK Kendal. Studi mengenai dampak KEK Kendal terhadap perekonomian wilayah menunjukkan adanya peningkatan investasi dan kesempatan kerja di dalam kawasan, tetapi pertanyaan mengenai sejauh mana aktivitas tersebut menghasilkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian wilayah sekitar tetap menjadi isu penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu kawasan belum dapat dipahami secara utuh tanpa menganalisis hubungan antara kegiatan ekonomi di dalam kawasan dan dinamika ekonomi di wilayah sekitarnya.

Permasalahan efektivitas juga berkaitan dengan biaya kebijakan yang harus ditanggung pemerintah. Pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal kepada perusahaan di KEK pada dasarnya merupakan bentuk intervensi pemerintah yang memiliki konsekuensi terhadap penerimaan negara dan daerah. Oleh karena itu, manfaat ekonomi yang dihasilkan harus dibandingkan dengan biaya dan potensi opportunity cost dari pemberian insentif tersebut. Afida dan Widodo (2023) menjelaskan bahwa insentif pajak berbasis lokasi memiliki karakteristik seperti pedang bermata dua (two-sided policy), karena di satu sisi dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mengurangi kesenjangan wilayah, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan biaya fiskal apabila tidak mampu menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi yang sebanding.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan KEK perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Efektivitas tidak cukup diukur berdasarkan pencapaian target investasi atau jumlah perusahaan yang masuk, tetapi perlu dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan produktivitas, perkembangan sektor ekonomi unggulan, peningkatan keterkaitan dengan pelaku usaha lokal, serta munculnya spillover effect terhadap wilayah sekitar. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan apakah perubahan indikator ekonomi tersebut benar-benar merupakan akibat dari penetapan KEK atau dipengaruhi oleh faktor lain seperti tren ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur umum, perubahan harga komoditas, kebijakan investasi, dan perkembangan sektor ekonomi tertentu.

Kebutuhan evaluasi tersebut semakin relevan karena pemerintah terus mengembangkan dan memperbaiki tata kelola KEK. Pada tahun 2024, Dewan Nasional KEK menerbitkan sejumlah pedoman terkait pengusulan, evaluasi pembangunan, kesiapan operasi, serta pengelolaan dan evaluasi KEK. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2024 secara khusus mengatur pedoman

pelaporan perkembangan, evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi kesiapan beroperasi KEK. Sementara itu, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor 5 Tahun 2024 memberikan pedoman pengelolaan dan evaluasi pengelolaan KEK. Keberadaan pedoman tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kinerja KEK telah menjadi bagian penting dari tata kelola kebijakan kawasan.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian penelitian terdahulu berfokus pada indikator tertentu, seperti kemiskinan, PDB per kapita, lapangan kerja, investasi, atau aktivitas ekonomi lokal. Penelitian lainnya berfokus pada kawasan tertentu, seperti KEK pariwisata atau KEK Kendal. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan pencanangan KEK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara komprehensif. Selain itu, perbedaan karakteristik antardaerah menunjukkan bahwa dampak KEK dapat bersifat heterogen. Oleh karena itu, penelitian yang menghubungkan kebijakan pencanangan KEK dengan perubahan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi penting untuk memberikan bukti empiris yang lebih kuat mengenai keberhasilan maupun keterbatasan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena penetapan KEK pada dasarnya merupakan keputusan kebijakan publik yang memiliki konsekuensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan fiskal. Jika kebijakan tersebut efektif, maka KEK seharusnya mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor produktif, peningkatan produktivitas, dan penciptaan keterkaitan ekonomi dengan masyarakat serta pelaku usaha lokal. Sebaliknya, apabila pertumbuhan hanya terkonsentrasi di dalam kawasan dan tidak menghasilkan dampak yang berarti terhadap wilayah sekitar, maka diperlukan evaluasi terhadap desain insentif, pembangunan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, keterkaitan industri, dan strategi pengembangan ekonomi lokal.

Urgensi penelitian juga diperkuat oleh kenyataan bahwa kebijakan KEK memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menciptakan kawasan investasi. Dewan Nasional KEK menempatkan KEK sebagai salah satu instrumen untuk mendorong hilirisasi, meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2024, capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja KEK bahkan telah melampaui target nasional. Namun, capaian tersebut perlu dikaji lebih jauh untuk memastikan bahwa keberhasilan administratif dan investasi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan KEK menawarkan peluang sekaligus menghadirkan tantangan bagi pembangunan ekonomi daerah. Di satu sisi, KEK dapat menjadi instrumen untuk mengatasi keterbatasan investasi, mempercepat industrialisasi, meningkatkan konektivitas ekonomi, dan menciptakan pusat pertumbuhan baru. Di sisi lain, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan, karakteristik wilayah, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, keterkaitan ekonomi lokal, serta kemampuan menciptakan efek pengganda di luar batas kawasan. Literatur internasional terbaru juga menekankan bahwa kebijakan berbasis kawasan dapat meningkatkan hasil ekonomi dan kesejahteraan apabila didukung perencanaan strategis, desain insentif yang tepat, dan tata kelola yang kuat, sekaligus perlu menghindari displacement effect atau

perpindahan aktivitas ekonomi yang hanya memindahkan pertumbuhan dari satu wilayah ke wilayah lain.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Pencanangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana pencanangan dan implementasi KEK mampu mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, kesempatan kerja, produktivitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai place-based policy dan pembangunan regional, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola KEK, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas kebijakan KEK. Dengan evaluasi yang berbasis bukti empiris, kebijakan KEK diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan penciptaan kawasan investasi, tetapi benar-benar mampu menjadi instrumen pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis efektivitas kebijakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tinjauan pustaka dipilih karena penelitian berfokus pada pengidentifikasian, penelaahan, perbandingan, dan sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai KEK, kebijakan berbasis kawasan (place-based policy), investasi, penciptaan lapangan kerja, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Snyder (2019) menjelaskan bahwa literature review dapat digunakan sebagai metodologi penelitian untuk mengidentifikasi perkembangan pengetahuan, mensintesis temuan penelitian, serta menemukan kesenjangan penelitian yang masih terbuka. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya merangkum hasil penelitian terdahulu, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap konsistensi temuan mengenai efektivitas KEK dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan KEK dan pertumbuhan ekonomi daerah. Literatur diperoleh melalui penelusuran basis data dan mesin pencarian akademik dengan menggunakan kata kunci seperti “Special Economic Zones”, “Kawasan Ekonomi Khusus”, “economic growth”, “regional economic growth”, “place-based policy”, “investment”, “employment”, dan “spillover effect”. Literatur yang dipilih diprioritaskan pada publikasi yang memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan bukti empiris atau konseptual mengenai hubungan antara kebijakan kawasan dan pembangunan ekonomi. Selain artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah digunakan untuk memperoleh informasi mengenai regulasi, tujuan kebijakan, perkembangan KEK, investasi, dan indikator kinerja kawasan. Strategi ini penting karena penelitian kebijakan publik membutuhkan integrasi antara bukti akademik dan dokumen kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Proses analisis literatur dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi literatur, seleksi sumber, ekstraksi informasi, pengelompokan temuan, analisis kritis, dan sintesis hasil penelitian. Pada tahap identifikasi, seluruh sumber yang relevan dikumpulkan berdasarkan kata kunci dan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan kesesuaian topik, kualitas sumber, tahun publikasi, serta ketersediaan informasi mengenai dampak KEK terhadap indikator ekonomi daerah. Informasi dari literatur terpilih kemudian diekstraksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu efektivitas kebijakan KEK, investasi, kesempatan kerja, pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, produktivitas, kemiskinan, ketimpangan, dan spillover effect terhadap wilayah sekitar. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu dibandingkan untuk mengidentifikasi pola temuan yang konsisten maupun kontradiktif. Pendekatan sistematis diperlukan agar proses tinjauan tidak dilakukan secara ad hoc, karena tinjauan pustaka yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas berpotensi menghasilkan sintesis yang kurang transparan dan sulit direplikasi (Snyder, 2019).

Untuk meningkatkan transparansi proses kajian, penelitian ini mengacu pada prinsip pelaporan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020, terutama dalam proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemilihan literatur yang relevan. PRISMA 2020 menyediakan kerangka pelaporan yang membantu peneliti menjelaskan secara transparan alasan suatu literatur dimasukkan atau dikeluarkan dari kajian serta bagaimana bukti yang diperoleh disintesis (Page et al., 2021). Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan hasil penelitian berdasarkan konteks wilayah, karakteristik KEK, indikator pertumbuhan ekonomi, dan metode penelitian yang digunakan. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk menjawab fokus penelitian mengenai sejauh mana kebijakan KEK efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas kebijakan, serta kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji. Dengan demikian, metode tinjauan pustaka dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan berbasis bukti mengenai hubungan antara kebijakan KEK dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran dan sintesis terhadap berbagai literatur yang relevan, dapat diketahui bahwa kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada dasarnya memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi efektivitasnya tidak bersifat seragam pada seluruh wilayah. Literatur yang dikaji memperlihatkan adanya tiga pola utama. Pertama, KEK mampu meningkatkan aktivitas ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan output, dan penguatan sektor ekonomi tertentu. Kedua, dampak KEK terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, serta keterkaitan antara aktivitas dalam kawasan dengan perekonomian lokal. Ketiga, terdapat wilayah yang menunjukkan dampak KEK relatif terbatas atau bahkan tidak signifikan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pencanangan KEK tidak dapat dipandang sebagai kebijakan yang secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Snyder (2019) bahwa sintesis literatur tidak cukup dilakukan dengan menginventarisasi hasil penelitian, tetapi harus digunakan untuk menemukan pola, perbedaan, dan hubungan antartemuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sintesis menunjukkan bahwa indikator investasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua dimensi yang saling berhubungan tetapi tidak identik. Peningkatan investasi dalam KEK merupakan salah satu output penting kebijakan, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan outcome yang lebih luas. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan perlu dinilai berdasarkan kemampuan KEK mengubah peningkatan aktivitas ekonomi kawasan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Secara umum, hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat bukti empiris yang mendukung kontribusi positif KEK terhadap pembangunan ekonomi lokal. Fadillah (2023), melalui pendekatan *difference-in-differences*, menemukan bahwa pendirian KEK di Indonesia berkaitan dengan peningkatan PDB per kapita, kesempatan kerja, dan upah tenaga kerja, serta penurunan ketimpangan pendapatan di kota yang menjadi lokasi KEK dibandingkan dengan kelompok kontrol. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan KEK memiliki potensi untuk menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas daripada sekadar peningkatan investasi di dalam kawasan. Dengan meningkatnya kegiatan produksi dan investasi, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, pendapatan tenaga kerja bertambah, dan aktivitas konsumsi masyarakat dapat mengalami peningkatan.

Namun, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa dampak KEK bersifat heterogen. Taufiqurrahman dan Khoirunurrofik (2023), misalnya, menemukan bahwa dari delapan kabupaten/kota yang dianalisis, empat wilayah mengalami penurunan tingkat kemiskinan setelah adanya KEK, sementara empat wilayah lainnya justru mengalami peningkatan kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KEK tidak menghasilkan konsekuensi sosial-ekonomi yang seragam. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh status suatu daerah sebagai lokasi KEK, tetapi juga oleh kemampuan daerah tersebut mengintegrasikan kegiatan KEK dengan struktur ekonomi lokal.

Efektivitas KEK dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hasil sintesis menunjukkan bahwa mekanisme utama yang menghubungkan KEK dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan investasi dan aktivitas produksi. KEK dirancang untuk menyediakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif melalui fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan perizinan, infrastruktur, serta dukungan kelembagaan. Apabila instrumen tersebut berjalan secara efektif, perusahaan akan memperoleh biaya transaksi yang lebih rendah dan kepastian usaha yang lebih tinggi. Peningkatan investasi selanjutnya memperbesar kapasitas produksi dan menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, barang, jasa, serta infrastruktur pendukung.

Dari perspektif teori pertumbuhan regional, mekanisme tersebut dapat menghasilkan efek pengganda. Investasi awal yang masuk ke kawasan tidak hanya menghasilkan output dari perusahaan penerima investasi, tetapi juga menciptakan permintaan terhadap berbagai input dan jasa lokal. Tenaga kerja yang memperoleh pendapatan dari aktivitas KEK kemudian meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, terdapat jalur transmisi dari investasi menuju produksi, pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Sihaloho dan Muna (2010) sejak

awal mengidentifikasi investasi, perdagangan, dan tenaga kerja sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dampak pembentukan KEK.

Akan tetapi, hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara KEK dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat langsung. Anggraini, Suparta, dan Murwiati (2025), yang menganalisis 14 KEK di Indonesia, menemukan bahwa infrastruktur jalan, investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi menjadi signifikan dalam jangka panjang. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini memberikan indikasi bahwa manfaat ekonomi KEK membutuhkan waktu untuk terakumulasi dan diterjemahkan menjadi pertumbuhan daerah.

Temuan tersebut memiliki implikasi penting terhadap evaluasi kebijakan. Apabila efektivitas KEK hanya dinilai dalam waktu singkat setelah pencanangan, maka dampak kebijakan dapat terlihat lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. Infrastruktur membutuhkan waktu untuk dibangun dan dimanfaatkan secara optimal, perusahaan membutuhkan waktu untuk beroperasi pada kapasitas penuh, sementara keterkaitan dengan pemasok lokal dan pasar tenaga kerja juga berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, evaluasi KEK perlu mempertimbangkan dimensi waktu dan membedakan antara dampak jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dengan demikian, efektivitas KEK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikategorikan sebagai efektivitas bersyarat. KEK akan lebih efektif apabila investasi yang masuk mampu meningkatkan kapasitas produksi daerah, menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal, meningkatkan produktivitas, mengembangkan sektor pendukung, dan menghasilkan keterkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, apabila perusahaan di dalam kawasan memiliki keterkaitan yang rendah dengan ekonomi lokal, maka peningkatan investasi belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Dampak KEK terhadap Investasi dan Aktivitas Ekonomi

Investasi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan KEK karena salah satu tujuan utama pembentukan kawasan adalah meningkatkan daya tarik investasi. KEK memberikan berbagai fasilitas yang ditujukan untuk mengurangi hambatan investasi dan meningkatkan daya saing lokasi. Dari hasil tinjauan pustaka, terdapat kecenderungan bahwa KEK mampu meningkatkan aktivitas investasi dan mendorong pembentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru.

Akan tetapi, peningkatan investasi perlu dibedakan antara investasi yang hanya meningkatkan nilai modal di dalam kawasan dengan investasi yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah secara luas. Investasi yang terintegrasi dengan pemasok lokal, tenaga kerja lokal, lembaga pendidikan, UMKM, dan jaringan distribusi daerah memiliki potensi menghasilkan multiplier effect yang lebih besar. Sebaliknya, investasi yang sangat bergantung pada input dari luar daerah dapat membatasi manfaat ekonomi lokal meskipun nilai investasinya besar.

Temuan mengenai KEK Kendal memberikan gambaran yang cukup kuat mengenai mekanisme tersebut. Penelitian tahun 2025 dengan pendekatan Propensity Score Matching-Difference in Difference dan analisis geospasial menemukan bahwa KEK Kendal berkontribusi terhadap peningkatan pengeluaran rumah tangga dan aktivitas ekonomi lokal. Kawasan tersebut juga memperkuat sektor manufaktur yang

terlihat melalui peningkatan location quotient, sementara data Night-Time Light menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi secara spasial. Temuan ini memberikan bukti bahwa KEK dapat menghasilkan dampak ekonomi yang melampaui batas internal kawasan apabila terdapat keterhubungan yang kuat dengan ekonomi wilayah.

Meskipun demikian, studi tersebut juga menunjukkan adanya tantangan terkait infrastruktur dan tenaga kerja. Artinya, keberadaan investasi saja belum cukup. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, kawasan permukiman, pendidikan vokasional, dan layanan publik mampu mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi. Jika tidak, peningkatan investasi dapat menghadapi bottleneck yang menghambat produktivitas dan mengurangi daya saing kawasan.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa insentif investasi harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem kebijakan, bukan sebagai instrumen tunggal. Efektivitas KEK akan lebih tinggi apabila insentif fiskal dan nonfiskal dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penyederhanaan birokrasi, penguatan UMKM, dan pengembangan rantai pasok lokal.

Dampak KEK terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu mekanisme penting yang menghubungkan KEK dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah penciptaan kesempatan kerja. Investasi baru membutuhkan tenaga kerja, baik pada tahap pembangunan kawasan maupun pada tahap operasional perusahaan. Penyerapan tenaga kerja berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperluas basis konsumsi masyarakat. Dalam jangka panjang, peningkatan kesempatan kerja juga dapat mendorong mobilitas tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi.

Hasil penelitian Fadillah (2023) mendukung argumen tersebut. Pendirian KEK ditemukan berkaitan dengan peningkatan lapangan kerja dan upah tenaga kerja di wilayah yang menjadi lokasi KEK. Dengan demikian, keberadaan kawasan dapat menghasilkan manfaat ekonomi langsung bagi tenaga kerja apabila terdapat kesesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal.

Namun demikian, penyerapan tenaga kerja tidak otomatis berarti bahwa seluruh masyarakat lokal memperoleh manfaat secara proporsional. Penelitian mengenai dampak ekonomi zona di Indonesia menunjukkan bahwa implikasi distribusional dapat berbeda antarwilayah. Hornok dan Raeskyesa (2024) menemukan bahwa pembukaan zona ekonomi di Indonesia secara umum berkaitan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan, meskipun peningkatannya relatif kecil dan dapat bersifat sementara. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan yang besar antarwilayah, yang mengindikasikan bahwa kondisi lokal sangat menentukan distribusi manfaat kebijakan kawasan.

Hal tersebut dapat dijelaskan melalui kemungkinan adanya skills mismatch. Perusahaan yang beroperasi dalam KEK umumnya membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Apabila penduduk lokal tidak memiliki keterampilan tersebut, perusahaan dapat merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Dalam situasi demikian, KEK tetap menciptakan lapangan kerja, tetapi manfaat pendapatan tidak sepenuhnya diterima masyarakat lokal. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa

pertumbuhan investasi dan output tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan atau ketimpangan secara otomatis.

Temuan mengenai Gresik memperkuat argumentasi tersebut. Studi terbaru menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan penurunan kemiskinan, tetapi penyerapan tenaga kerja lokal masih menghadapi kesenjangan dibandingkan target. Faktor yang disebutkan antara lain ketidaksesuaian kompetensi, perubahan struktur ekonomi lokal, keterbatasan pendidikan vokasional, dan kurangnya integrasi informasi pasar kerja.

Dengan demikian, efektivitas KEK terhadap kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas keterkaitan antara pasar kerja kawasan dan tenaga kerja lokal. Program pendidikan vokasional, upskilling, reskilling, sertifikasi kompetensi, serta kemitraan antara perusahaan KEK dan institusi pendidikan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat menjadi penerima manfaat utama dari pertumbuhan kawasan.

Spillover Effect KEK terhadap Wilayah Sekitar

Efektivitas KEK tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan perubahan ekonomi di dalam wilayah administrasi tempat kawasan berada. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan kawasan adalah munculnya spillover effect atau efek limpahan terhadap kabupaten/kota di sekitarnya. Secara teoritis, efek limpahan dapat muncul melalui perdagangan, mobilitas tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, pembangunan infrastruktur, jasa transportasi, aktivitas UMKM, serta hubungan pemasok dan pelanggan.

Akan tetapi, bukti empiris menunjukkan bahwa spillover effect KEK di Indonesia masih bervariasi. Violita dan Khoirunurrofik (2025), menggunakan pendekatan Dynamic Spatial Durbin Model, menemukan bahwa dampak KEK terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah terutama terlihat pada KEK pariwisata, sedangkan KEK manufaktur belum menunjukkan dampak yang signifikan. Dampak terhadap pertumbuhan wilayah juga cenderung bersifat sementara. Sementara itu, pada wilayah sekitar, pertumbuhan PDRB dan teknologi informasi dan komunikasi menjadi variabel yang berpengaruh.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pembangunan kawasan tidak secara otomatis menghasilkan penyebaran pertumbuhan ke wilayah sekitar. KEK dapat menciptakan pusat aktivitas ekonomi yang relatif terisolasi apabila jaringan transportasi, pemasok, pasar tenaga kerja, dan hubungan bisnis dengan daerah sekitar tidak berkembang. Kondisi ini dikenal sebagai risiko enclave economy, yaitu keadaan ketika kegiatan ekonomi kawasan berkembang tetapi memiliki keterkaitan terbatas dengan ekonomi lokal.

Sebaliknya, jika KEK terintegrasi dengan wilayah sekitarnya, maka pertumbuhan dapat menyebar melalui berbagai saluran. Peningkatan permintaan terhadap makanan, transportasi, perumahan, jasa keuangan, perdagangan, logistik, dan jasa profesional dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di luar kawasan. Oleh karena itu, pembangunan KEK perlu dirancang sebagai bagian dari sistem ekonomi regional, bukan sebagai entitas ekonomi yang berdiri sendiri.

Efektivitas KEK Ditinjau dari Dimensi Sosial dan Distribusi Ekonomi

Hasil sintesis menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan KEK harus dibedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi inklusif. Suatu daerah

dapat mengalami peningkatan PDRB tetapi belum tentu seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Oleh karena itu, indikator PDRB perlu dilengkapi dengan indikator PDRB per kapita, kemiskinan, pengangguran, upah, ketimpangan pendapatan, dan kualitas pekerjaan.

Temuan Hornok dan Raeskyesa (2024) menunjukkan bahwa kebijakan zona ekonomi di Indonesia memiliki implikasi distribusional yang perlu diperhatikan. Meskipun peningkatan ketimpangan secara rata-rata relatif kecil, terdapat variasi regional yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik lokal memengaruhi distribusi manfaat ekonomi dari kawasan.

Sementara itu, penelitian Taufiqurrahman dan Khoirunurrofik (2023) menemukan hasil yang lebih kompleks terkait kemiskinan. Dari delapan wilayah yang diteliti, empat mengalami penurunan kemiskinan dan empat lainnya mengalami peningkatan. Temuan ini menunjukkan bahwa KEK bukanlah instrumen yang secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada mekanisme transmisi manfaat kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Oleh sebab itu, kebijakan KEK perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program penguatan UMKM, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pengembangan pemasok lokal, akses pembiayaan, serta perlindungan sosial bagi kelompok yang mengalami perubahan struktur ekonomi. Pendekatan tersebut diperlukan agar KEK tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi tetapi juga menghasilkan pertumbuhan yang inklusif.

Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Kebijakan KEK

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, efektivitas kebijakan KEK dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama. Pertama adalah infrastruktur. Jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air, dan fasilitas logistik merupakan prasyarat penting bagi kelancaran kegiatan ekonomi. Tanpa infrastruktur yang memadai, insentif investasi tidak akan cukup untuk membuat kawasan kompetitif.

Kedua adalah kualitas sumber daya manusia. Kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri menentukan sejauh mana masyarakat lokal dapat menikmati manfaat penciptaan lapangan kerja. Ketiga adalah kualitas kelembagaan dan tata kelola. Kepastian regulasi, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta kapasitas pengelola kawasan menentukan efisiensi implementasi kebijakan.

Keempat adalah keterkaitan ekonomi lokal. Semakin kuat hubungan perusahaan dalam KEK dengan UMKM, pemasok lokal, lembaga pendidikan, dan pasar lokal, semakin besar kemungkinan munculnya efek pengganda. Kelima adalah karakteristik sektor KEK. Bukti dari Violita dan Khoirunurrofik (2025) menunjukkan bahwa dampak KEK pariwisata dan manufaktur dapat berbeda. Hal ini berarti bahwa desain kebijakan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sepenuhnya seragam untuk seluruh jenis KEK.

Keenam adalah kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan KEK dengan strategi pembangunan wilayah. KEK yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan rencana pembangunan daerah berpotensi menghasilkan pertumbuhan yang terkonsentrasi. Sebaliknya, integrasi dengan kebijakan transportasi, pendidikan, UMKM, investasi, perumahan, dan tata ruang dapat memperbesar dampak ekonomi.

Pembahasan: KEK sebagai Kebijakan Place-Based yang Efektif tetapi Bersyarat

Berdasarkan keseluruhan hasil sintesis, dapat dikemukakan bahwa KEK merupakan bentuk place-based policy yang memiliki potensi nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi efektivitasnya bersifat kontekstual, heterogen, dan bergantung pada kualitas implementasi. Kesimpulan ini didukung oleh adanya penelitian yang menunjukkan dampak positif terhadap PDB per kapita, pekerjaan, upah, investasi, pengeluaran rumah tangga, dan aktivitas ekonomi, tetapi juga terdapat penelitian yang menunjukkan dampak yang lemah, sementara, atau berbeda antarwilayah.

Dengan demikian, keberhasilan KEK tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan indikator jumlah investasi. Investasi merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi bukan kondisi yang selalu mencukupi. Agar investasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan mekanisme transmisi yang menghubungkan investasi dengan produksi lokal, tenaga kerja lokal, pendapatan rumah tangga, UMKM, dan konsumsi. Jika mekanisme tersebut tidak berjalan, maka manfaat investasi dapat tetap terkonsentrasi pada perusahaan dan kawasan.

Dari perspektif evaluasi kebijakan, temuan ini mengarah pada kebutuhan untuk menggunakan indikator efektivitas yang lebih komprehensif. Indikator tersebut sekurang-kurangnya meliputi: (1) pertumbuhan PDRB; (2) PDRB per kapita; (3) realisasi investasi; (4) penciptaan lapangan kerja; (5) perkembangan upah; (6) tingkat kemiskinan; (7) ketimpangan pendapatan; (8) perkembangan sektor ekonomi unggulan; (9) keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal; serta (10) spillover effect terhadap daerah sekitar.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dimensi waktu merupakan faktor penting dalam mengevaluasi efektivitas KEK. Dampak kebijakan dapat membutuhkan waktu karena pembangunan infrastruktur, masuknya investor, proses produksi, perekrutan tenaga kerja, dan pembentukan rantai pasok berlangsung secara bertahap. Penelitian Anggraini et al. (2025) yang menunjukkan bahwa beberapa determinan pertumbuhan baru signifikan dalam jangka panjang memperkuat argumen tersebut.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas KEK harus mempertimbangkan heterogenitas wilayah. Daerah dengan infrastruktur yang baik, sumber daya manusia berkualitas, akses pasar yang kuat, dan institusi yang efektif cenderung lebih mampu mengkonversi insentif KEK menjadi aktivitas ekonomi. Sebaliknya, daerah yang memiliki keterbatasan struktural dapat memperoleh manfaat yang lebih kecil meskipun mendapatkan fasilitas kebijakan yang sama.

Dengan demikian, kebijakan KEK sebaiknya diarahkan dari pendekatan “kawasan sebagai pusat investasi” menuju pendekatan “kawasan sebagai pusat ekosistem ekonomi regional.” Pergeseran perspektif tersebut berarti bahwa keberhasilan KEK tidak hanya diukur berdasarkan kinerja kawasan, tetapi berdasarkan kemampuannya menghubungkan perusahaan, tenaga kerja, UMKM, pemerintah daerah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan pasar regional.

Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan keseluruhan literatur yang dianalisis, terdapat beberapa temuan utama. Pertama, KEK memiliki potensi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi, peningkatan aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Kedua, dampak tersebut tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing wilayah. Ketiga, manfaat KEK terhadap

kesejahteraan masyarakat tidak selalu berjalan secara otomatis karena terdapat persoalan ketimpangan, kesenjangan keterampilan, dan keterbatasan penyerapan tenaga kerja lokal.

Keempat, spillover effect terhadap wilayah sekitar merupakan indikator penting tetapi belum selalu muncul secara kuat. Kelima, dampak kebijakan dapat berbeda menurut jenis KEK; bukti empiris menunjukkan bahwa KEK pariwisata dan manufaktur dapat menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda. Keenam, keberhasilan KEK sangat dipengaruhi oleh infrastruktur, kualitas SDM, investasi, PAD, teknologi informasi dan komunikasi, serta kualitas kelembagaan. Ketujuh, efektivitas KEK perlu dinilai dalam perspektif jangka panjang karena dampak ekonomi tidak selalu muncul segera setelah kawasan ditetapkan.

Secara konseptual, hasil sintesis dapat dirumuskan dalam hubungan berikut:

Penetapan KEK → Insentif dan Infrastruktur → Investasi → Aktivitas Produksi → Lapangan Kerja dan Pendapatan → Konsumsi dan Permintaan Lokal → Keterkaitan Ekonomi → Spillover Effect → Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa transmission channels yang menentukan efektivitas kebijakan. Apabila salah satu mata rantai lemah, dampak akhir terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat berkurang. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan KEK perlu mengidentifikasi bukan hanya apakah pertumbuhan terjadi, tetapi juga melalui mekanisme apa pertumbuhan tersebut terjadi dan siapa yang memperoleh manfaatnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian melalui tinjauan pustaka memperlihatkan bahwa kebijakan KEK dapat dinilai efektif secara potensial, tetapi belum dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang secara universal efektif di seluruh daerah. Efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pengelola kawasan membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Temuan tersebut sekaligus memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan KEK tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan pencapaian investasi dan jumlah perusahaan, tetapi berdasarkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan keterkaitan ekonomi regional.

Dengan demikian, kebijakan KEK perlu diarahkan pada strategi yang lebih integratif melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, pengembangan UMKM, peningkatan keterkaitan industri lokal, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta pemantauan dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan tersebut akan meningkatkan kemungkinan bahwa manfaat KEK tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha di dalam kawasan, tetapi juga menyebar kepada masyarakat dan wilayah sekitarnya. Temuan terbaru mengenai KEK Kendal, misalnya, menunjukkan bahwa kawasan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal ketika aktivitas industri, konsumsi rumah tangga, dan jaringan ekonomi wilayah berkembang secara bersamaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi yang cukup kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan. Namun, efektivitas kebijakan KEK tidak bersifat seragam pada seluruh wilayah dan tidak dapat diukur hanya berdasarkan

besarnya investasi atau jumlah perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan variasi antardaerah karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta keterkaitan antara kegiatan ekonomi KEK dengan perekonomian lokal. Dengan demikian, KEK dapat dikategorikan sebagai kebijakan place-based yang efektif secara potensial, tetapi efektivitasnya bersifat kontekstual dan bergantung pada kualitas implementasi serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi kawasan.

Selanjutnya, keberhasilan KEK dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan menciptakan multiplier effect dan spillover effect terhadap masyarakat serta wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kebijakan KEK perlu diarahkan tidak hanya sebagai instrumen untuk menarik investasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi regional melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, pengembangan UMKM dan rantai pasok lokal, peningkatan keterkaitan industri, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan, dunia usaha, dan institusi pendidikan. Evaluasi KEK juga perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan indikator yang lebih komprehensif, meliputi pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, investasi, kesempatan kerja, upah, kemiskinan, ketimpangan, produktivitas, dan dampak ekonomi terhadap wilayah sekitar. Dengan pendekatan tersebut, KEK diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di dalam kawasan, tetapi mampu menciptakan pertumbuhan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afida, C. N., & Widodo, C. A. (2023). The location-based tax incentives in Indonesia: Special Economic Zones. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(2). <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2171>
- Anggraini, S. R., Suparta, I. W., & Murwiati, A. (2025). Special Economic Zones and local economic development: An Indonesia perspective. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(7), 258–277. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i71889>
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2024a). Kawasan Ekonomi Khusus: Strategi jitu Indonesia di tengah tantangan ekonomi global. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2024b). Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Perkembangan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, dan Evaluasi Kesiapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2024c). Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus.
- Duranton, G., & Venables, A. J. (2018). Place-based policies for development. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 24562. <https://doi.org/10.3386/w24562>

- Fadillah, M. I. (2023). Dampak Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia terhadap perkembangan ekonomi lokal [Tesis, Universitas Indonesia].
- Fadillah, M. I. (2023). The impact of Indonesia's Special Economic Zones on local economic development [Master's thesis, Universitas Indonesia].
- Hornok, C., & Raeskyesa, D. G. S. (2024). Economic zones and local income inequality: Evidence from Indonesia. *The Journal of Economic Inequality*, 22, 69–100. <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09581-x>
- Kimura, Y. (2025). Zone-based policies as tools for regional development. *OECD Regional Development Papers*, No. 170. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4373e008-en>
- OECD. (2020). *OECD investment policy reviews: Indonesia 2020*. OECD Publishing.
- Oktaviana, N. K., & Qibthiyyah, R. M. (2025). The impact of tourism Special Economic Zones (SEZs) in encouraging regional economic growth. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 18(1). <https://doi.org/10.24843/JEKT.2025.v18.i01.P03>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161949/pp-no-40-tahun-2021>
- Rothenberg, A. D., Wang, Y., & Chari, A. (2025). When regional policies fail: An evaluation of Indonesia's Integrated Economic Development Zones. *Journal of Development Economics*, 176, 103503. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103503>
- Setiadi, E., et al. (2025). Does a special economic zone impact the surrounding economy? The case study of Kendal, Indonesia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 225. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04448-0>
- Sihaloho, T., & Muna, N. (2010). Kajian dampak ekonomi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 4(1). <https://doi.org/10.30908/bilp.v4i1.150>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Taufiqurrahman, T., & Khoirunurrofik, K. (2023). Special Economic Zones (SEZs) impact on poverty in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 7(2), 231–249. <https://doi.org/10.36574/jpp.v7i2.473>
- Violita, R., & Khoirunurrofik, K. (2025). Peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah: Analisis spasial eksternalitas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 25(1), 95–111. <https://doi.org/10.7454/jepi.v25i1.1483>